



LAPORAN AKTUALISASI

PERCEPATAN PROSES PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO PADA AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

Disusun Oleh:

NAMA : FAISAL RIYADI. S.E.
NIP : 19891123 201903 1 001
INSTANSI : INSPEKTORAT II

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

PERCEPATAN PROSES PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO PADA AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

NAMA : FAISAL RIYADI. S.E.
NIP : 19891123 201903 1 001
INSTANSI : INSPEKTORAT II

Jakarta, September 2019

Menyetujui,
Mentor

Faisal Riyadi, S.E.
NIP: 198911232019031001

Mengetahui,
Coach

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP: 197212031998032003

Menyetujui,
Mentor

Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP: 196907151999031004

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
------------------------	---

KATA PENGANTAR	6
----------------------	---

BAB I	7
-------------	---

PENDAHULUAN	7
-------------------	---

A. LATAR BELAKANG.....	7
---------------------------	---

1. Visi Misi Unit Kerja Eselon II, Struktur Organisasi, dan Penjelasan Tugas dan Fungsi.....	7
---	---

2. Kondisi Saat Ini.....	12
---------------------------	----

3. Kondisi yang diharapkan	13
-----------------------------------	----

4. Identifikasi Isu	14
----------------------------	----

5. Teknik Analisis (USG)	15
---------------------------------	----

6. Gagasan Pemecahan Isu	16
---------------------------------	----

B. TUJUAN.....	16
-------------------	----

C. MANFAAT	16
---------------------	----

BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI	17
--------------------------------------	----

A. RANCANGAN AKTUALISASI.....	17
----------------------------------	----

B. CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI.....	26
---	----

BAB III PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN	29
---	----

A. KEGIATAN:.....	29
----------------------	----

B. STAKEHOLDER	43
-------------------------	----

C. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN	43
---	----

D. TIME SCHEDULE	44
---------------------------	----

BAB IV PENUTUP	45
----------------------	----

A. KESIMPULAN	45
------------------------	----

B. SARAN.....	45
------------------	----

LAMPIRAN KEGIATAN.....	46
------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi8

Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG.....15

Tabel 3. Kegiatan Aktualisasi19

Tabel 4. Capaian Kegiatan Aktualisasi27

Tabel 5. Analisis Dampak Internal dan Eksternal Jika Kegiatan Tidak Dilakukan.....45

Tabel 6. Timeline Rencana Kegiatan Aktualisasi.....46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Koordinasi dan Presentasi Singkat dengan Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II	30
Gambar 2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi.....	31
Gambar 3. Koordinasi dengan BDTI.....	31
Gambar 4. Bimbingan Pertama dengan <i>Coach</i>	32
Gambar 5. Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II.....	33
Gambar 6. Konsep Aplikasi Peta Risiko	34
Gambar 7. Konsep Kriteria Faktor Risiko.....	34
Gambar 8. Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan	35
Gambar 9. Surat Permintaan Data ke Biro Kepegawaian	35
Gambar 10. Pengiriman Rancangan Aplikasi Peta Risiko via Email DPR RI kepada BDTI.....	36
Gambar 11. Surat Pembuatan Cloud Inspektorat II	37
Gambar 12. Rapat Koordinasi Tahap II dengan Pihak BDTI.....	38
Gambar 13. Daftar Ukuran Risiko.....	38
Gambar 14. Daftar Kriteria Risiko.....	39
Gambar 15. Daftar Peta Risiko	39
Gambar 16. Laporan Peta Risiko Per Tahun 1	40
Gambar 17. Laporan Peta Risiko Per Tahun 2.....	40
Gambar 18. Laporan Peta Risiko Per Satker.....	41
Gambar 19. Statistik Anggaran Yang Dikelola.....	41
Gambar 20. Statistik Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.....	42
Gambar 21. Statistik Kepegawaian.....	42
Gambar 22. Uji Coba Aplikasi Peta Risiko dan Penyebaran Form Evaluasi.....	43
Gambar 23. Analisa Form Evaluasi.....	43
Gambar 24. Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko di Lingkungan Inspektorat II.....	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT,

Penyusunan laporan yang berjudul "Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II" ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P selaku mentor
2. Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si selaku coach

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai calon Auditor Ahli Pertama di Inspektorat II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta peran dan kedudukan ASN. Laporan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Faisal Riyadi, S.E.

NIP: 19891123 201903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Visi Misi Unit Kerja Eselon II, Struktur Organisasi, dan Penjelasan Tugas dan Fungsi

a. VISI

Adapun visi dari Inspektorat II selaras dengan visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama, yaitu:

“Menjadikan Inspektorat II yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas dalam mewujudkan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan”

b. MISI

Sedangkan misi dari Inspektorat II adalah

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja yang baik di Lingkungan BKD dan Deputi Persidangan
2. Meningkatkan peran Inspektorat II sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* atas sistem pengendalian intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan
3. Mewujudkan Aparat Inspektorat II yang Profesional

I. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur Organisasi



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pendukung telah diatur keberadaannya dalam Pasal 294 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang Administrasi serta Persidangan dan dalam melaksanakan wewenang tugasnya Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki susunan organisasi, diantaranya yaitu Inspektur Utama.

Inspektorat utama merupakan unsur Aparat Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya agar Sekretariat Jenderal DPR-RI

berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi untuk membentuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mengimplementasikan tugas tersebut, Inspektorat Utama dibawahnya memiliki unit organisasi Inspektorat II yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Deputy Persidangan dan Badan Keahlian.

Inspektorat II dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman secara teknis dalam mendukung keberadaan Rencana Strategis Inspektorat Utama dan Rencana Strategis Sekretaris Jenderal DPR-RI. Rencana Strategis Inspektorat I untuk memastikan adanya hubungan kerja yang sinergis dengan Inspektorat II. Bagian Tata Usaha dan para Auditor di lingkungan Inspektorat Utama, serta hubungan koordinasi dengan Biro/Pusat atau bagian lain di luar Inspektorat II.

c. Tugas dan Fungsi

Dalam pasal 257 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI disebutkan bahwa "Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Badan Keahlian DPR RI dan Deputy Bidang Persidangan".

Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Inspektorat UU menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat II;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Inspektorat II;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat II;
- e. Perumusan kebijakan pengawasan;

- f. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- g. Pelaksanaan evaluasi atas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- h. Penanganan audit investigasi terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- i. Penanganan pengaduan terhadap bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- j. Pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- k. Pelaksanaan peran serta kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kejahatan keuangan;
- l. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- m. Pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin dan penerapan kode etik pegawai di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- n. Pembinaan Satuan Pengendalian Internal (SPI);
- o. Pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait;
- p. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
- q. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;

- r. Pemberian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
 - s. Pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
 - t. Pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan Badan Keahlian;
 - u. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
 - v. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II;
 - w. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektorat Utama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat II adalah sebagai berikut:
- 1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern.
 - 2. Meningkatkan fungsi pembinaan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat II.
 - 3. Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Aparat Inspektorat II.
- e. Sasaran Strategis dari Inspektorat II berujung kepada meningkatnya kualitas dan kuantitas dukungan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian intern Inspektur II terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keahlian dan Deputy Bidang Persidangan yang transparan dan akuntabel.
- 1. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II melalui kerja sama dengan pihak eksternal;

2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat II dalam mewujudkan *Good Government* atas kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan BKD dan Deputi Persidangan;
3. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat II.

2. Kondisi Saat Ini

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pemerintahan yang baik terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.

Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama adalah unit kerja dengan fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khusus untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Inspektorat II harus mampu berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam hal pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan parlemen. Inovasi dan kreasi tiada henti dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baru, sebagai contoh Inspektorat Utama saat ini tidak hanya menjadi *watchdog* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tapi juga sebagai pemberi konsultasi terhadap segala permasalahan yang ada khususnya terhadap kegiatan yang dapat mengarah kepada kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam hal ini rencana kegiatan audit intern tahunan berisi rencana kegiatan audit intern yang berbasis risiko dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit intern harus didasarkan pada evaluasi/penilaian risiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat.

3. Kondisi yang diharapkan

- Inspektorat II pada khususnya harus memiliki peta risiko terhadap auditi (Deputi Persidangan II dan Badan Keahlian) yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.
- Terwujudnya Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko

- Tercapainya peran Inspektorat II sebagai *Counseling Partner* dan *Quality Assurance* atas Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Badan Keahlian dan Deputi Bidang Persidangan.

4. Identifikasi Isu

- a. Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Dalam pelaksanaan kegiatan audit selama ini masih hanya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Irtama sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan Peraturan Inspektur Utama Nomor: IU/01/SETJEN DAN BK DPR_RI/IRTAMA/XI/2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, tetapi itu hanya mencakup garis besar kegiatan pengawasan. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

- b. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat ketumpang tindihan antara tugas pokok dengan tugas mandatori (contoh Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), sehingga harapan untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi agak sedikit terhambat.

- c. Belum adanya nilai risiko *auditable units*

Perlu adanya nilai risiko unit-unit yang berada di bawah pengawasan Inspektorat II di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI, seberapa besar risiko yang sering terjadi di tiap unit, seberapa besar risiko yang kemungkinan akan terjadi, sehingga dapat membuat program kerja pengawasan yang berbasis risiko serta meminimalisir terjadinya temuan.

5. Teknik Analisis (USG)

Tabel 2. Penilaian Prioritas Isu Dengan Metode USG

No.	Isu	Kriteria			Total
		U	S	G	
1.	Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	3	4	3	10
2.	Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.	3	4	4	11
3.	Belum adanya nilai risiko <i>auditable units</i>	4	5	5	14

Keterangan:

U= Urgency (Penting)

S = Seriousness (Keseriusan)

G = Growth

Range

Skor 5 = Sangat Besar

Skor 4 = Besar

Skor 3 = Cukup

Skor 2 = Kecil

Skor 1 = Sangat Kecil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah: isu nomor 3, yaitu Belum adanya nilai risiko *auditable units*.

Deskripsi:

- **Urgency** = Belum terdapatnya peta risiko serta aplikasi yang dapat menunjang input data dari peta risiko tersebut di lingkungan Inspektorat II, sehingga isu ini dianggap sangat penting dan dari sisi urgensi berada pada indikator level 4.
- **Seriousness** = Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II yang belum berbasis risiko, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan membuat peta risiko dengan aplikasi

penunjangnya. Penilaian dari sisi *seriousness* berada pada level 5 yang berarti sangat serius.

- **Growth** = Belum adanya *tools* untuk mengukur risiko dari setiap unit yang berada di area pengawasan Inspektorat II, hal ini perlu menjadi perhatian serius karena akan berdampak pada kurang efektifnya sistem dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat II, hal ini juga akan menjadi isu kontemporer yang dapat terjadi berulang-ulang, sehingga penilaian dari sisi *Growth* berada pada level 5 yang berarti sangat besar kemungkinan isu tersebut akan tumbuh dan berkembang.

6. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan pemecahan isu melalui Teknik USG, maka didapat isu nomor 3, yaitu belum adanya nilai risiko *auditable units*. Oleh karena itu dibutuhkan pemecahan solusi melalui pemikiran saya bersama dengan coach, dan mentor melalui gagasan berjudul "*Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II*"

B. TUJUAN

1. Tersusunnya aplikasi peta risiko yang sistematis di lingkungan auditi Inspektorat II Setjen dan BK DPR RI.
2. Tercapainya audit yang berbasis risiko.
3. Memberikan kontribusi kepada Inspektorat Utama dalam meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM).

C. MANFAAT

1. Memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap auditi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko.
3. Memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan auditi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Identifikasi Isu	:	<div><div>A. Belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI</div><div>B. Belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di Lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.</div><div>C. Belum adanya nilai risiko <i>auditable units</i></div></div>
Isu yang Diangkat	:	Belum adanya nilai risiko <i>auditable units</i>
Gagasan Pemecahan Isu	:	Percepatan Proses Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II

Tabel 3
Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Penguatan Nilai Organisasi
1	Rapat dengan Internal Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta Persetujuan Pimpinan (Plt Inspektur II) - Penjadwalan waktu rapat ke bagian TU - Pelaksanaan rapat - Pembuatan laporan singkat hasil rapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal rapat yang telah disetujui - Daftar hadir kegiatan rapat - Laporan singkat hasil rapat - Dokumentasi kegiatan 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan ditunjukan dengan adanya materi rapat dan laporan singkat hasil rapat 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan Inspektorat II 3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan perubahan di lingkungan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan musyawarah 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar pada keahlian 4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan

				Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan atasan	keputusan dalam rapat
2	Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan dengan BDTi - Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi - Pembuatan laporan hasil konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat hasil konsultasi - Dokumentasi kegiatan 	Nilai Dasar PNS: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan ditunjukan dengan adanya laporan singkat dan dokumentasi hasil rapat 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan BDTI 3. Komitmen Mutu Kemauan keras dari adanya kesadaran untuk melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam memecahkan suatu masalah 3. Profesional Segala bentuk keputusan yang diambil berdasar pada keahlian 4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap pengambilan

				<p>perubahan di lingkungan kerja</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi lintas instansi antara Inspektorat II dengan BDTI</p>	<p>keputusan dalam rapat</p>
3	<p>Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta data jumlah seluruh pegawai yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian beserta Analisis Beban Kinerja (ABK) - Meminta data kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait capaian realisasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permintaan Data - Data penunjang terkait penyusunan aplikasi 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejelasan tujuan dalam permintaan data kepada unit lain. 2. Etika Publik menjalankan salah satu nilai dasar yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan menggunakan etika sopan santun dalam berkomunikasi dengan stakeholder terkait. 3. Komitmen Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam melakukan pengumpulan data terkait 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pengumpulan data terkait 3. Profesional Pengumpulan data dengan cara menjalin komunikasi dan

		<p>semua unit yang berada di bawah Deputi Persidangan dan Badan Keahlian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terkait data tindak lanjut hasil temuan BPK 		<p>Efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan data penunjang sebagai bahan penyusunan aplikasi.</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> terlihat melalui koordinasi dengan unit lain.</p>	<p>koordinasi yang profesional</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap data yang sudah diberikan oleh pihak lain</p>
4	Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan data sesuai jenis dan periode - Pengolahan data di dalam Microsoft Excel - Membuat peta risiko berdasarkan hasil pengolahan data tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem peta risiko yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan pengawasan tahunan - Data risiko yang tersusun rapi 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Bertanggung jawab memenuhi pertanggung jawaban sebagai bukti hasil pelaksanaan Latihan Dasar. 2. Etika Publik Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam membuat aplikasi peta risiko 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam penyusunan

				<p>dalam proses pelaksanaan.</p> <p>3. Komitmen mutu Menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan orientasi mutu pada penyusunan aplikasi peta risiko</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> Kolaborasi antar unit dalam membuat suatu inovasi yang baru</p> <p>Pelayanan Publik Diharapkan aplikasi peta risiko tersebut dapat meningkatkan standar dan mutu pengawasan, sehingga akuntabilitas kinerja Setjen dan BK DPR RI dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik</p>	<p>aplikasi peta risiko</p> <p>3. Profesional Penyusunan aplikasi peta risiko yang berdasar pada masukan dari para ahli</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab terhadap penyusunan aplikasi peta risiko</p>
5	Melakukan uji coba dan Evaluasi Peta	- Meminta pegawai	- Kegiatan uji coba - Kemudahan dan kesulitan dalam	<p>Nilai Dasar PNS: 1. Akuntabilitas</p>	1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral

	<p>Risiko beserta aplikasi pendukungnya</p>	<p>Inspektorat II untuk uji coba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta pegawai Inspektorat II untuk mencari risiko sebagai bekal pengawasan dari auditi yang akan diawasinya - Membuat form evaluasi - Menyebarkan form evaluasi kepada user yang melakukan uji coba - Menganalisa hasil evaluasi 	<p>mengoperasikan aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form evaluasi - Masukan dari user - Hasil evaluasi 	<p>Bertanggung jawab terhadap hasil, serta meminta feedback untuk penyempurnaan hasil.</p> <p>2. Etika publik Berkomunikasi dengan baik ketika meminta feedback pendapat terkait dengan produk yang sudah kita hasilkan.</p> <p>3. Komitmen mutu (Menjaga nilai mutu dari aplikasi peta risiko demi tercapainya suatu produk sistem yang efektif, efisien dan terjaga kualitas mutunya).</p> <p>Peran dan Kedudukan:</p> <p><i>Whole of Government</i> Kolaborasi dalam hal penyempurnaan aplikasi peta risiko .</p> <p>Pelayanan Publik</p>	<p>dalam melakukan uji coba hasil penyusunan evaluasi peta risiko</p> <p>2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan uji coba aplikasi peta risiko</p> <p>3. Profesional Meminta masukan dari para ahli terkait uji coba aplikasi peta risiko</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan uji coba aplikasi peta risiko</p>
--	---	--	--	---	--

				Mengukur seberapa besar manfaat dari suatu inovasi sistem yang telah saya coba realisasikan.	
6	Melaporkan hasil akhir kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan laporan - Sosialisasi materi aplikasi peta risiko di lingkungan Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil kegiatan - Pemanfaatan aplikasi peta risiko di lingkungan Inspektorat II - Laporan singkat hasil sosialisasi akhir - Dokumentasi kegiatan 	<p>Nilai Dasar PNS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Menerapkan nilai-nilai transparansi dan sikap bertanggung jawab terhadap hasil akhir dari suatu pekerjaan. 2. Nasionalisme Penyusunan aplikasi peta risiko yang dapat bermanfaat bagi kepentingan Bersama. 3. Etika publik Berkomunikasi dengan baik ketika menyampaikan laporan hasil akhir dari suatu gagasan. 4. Komitmen mutu Menjaga nilai mutu dari aplikasi peta risiko demi tercapainya suatu produk sistem yang efektif, efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Religius Melaksanakan nilai-nilai moral dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan 2. Akuntabel Melaksanakan prinsip keterbukaan dalam pelaporan hasil rancangan aktualisasi kegiatan 3. Profesional Melaksanakan pelaporan hasil rancangan aktualisasi dengan meminta

				<p>dan terjaga kualitas mutunya.</p> <p>5. Anti Korupsi Suatu output hasil yang dapat dijadikan <i>tools</i> untuk mencegah praktik menyimpang dan mengarah kepada indikasi korupsi.</p> <p>Peran dan Kedudukan: <i>Whole of Government</i> Koordinasi antar unit dalam penyempurnaan hasil</p>	<p>masukan dari para rekan auditor yang ahli di bidangnya</p> <p>4. Integritas Memiliki kejujuran dan tanggung jawab.</p>
--	--	--	--	--	---

B. CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4

Capaian Kegiatan Aktualisasi

Milestone	No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Rapat dengan Internal Inspektorat II	1	Presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 1 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	2	Pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan sudah ditandatangani oleh Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 2 <ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi
	3	Bimbingan Pertama dengan <i>coach</i> Ibu Heny Widyaningsih	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 3 <ul style="list-style-type: none"> Kartu Kendali Foto Kegiatan
	4	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II	Kamis, 25 Juli 2019	Lampiran 4 <ul style="list-style-type: none"> Undangan Rapat Absensi Rapat Laporan Singkat Rapat Bahan Rapat Foto Kegiatan
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	5	Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan 2	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 5 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Singkat Foto Kegiatan
	6	Mengirim rancangan aplikasi peta risiko ke BDTI cc. Sasmito	Selasa, 30 Juli 2019	Lampiran 6 <ul style="list-style-type: none"> Screenshot Email Rancangan Aplikasi Peta Risiko

Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko	7	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Anggaran yang dikelola oleh 10 biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 7 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Data
	8	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Analisis Beban Kinerja (ABK) ke Biro Kepegawaian	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 8 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Data
	9	Membuat dan mengirimkan surat permintaan pembuatan akun cloud ke Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk Inspektorat II	Rabu, 31 Juli 2019	Lampiran 9 <ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II
	10	Penerimaan data ABK 2017-2019	Jumat, 2 Agustus 2019	Lampiran 10 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Email • Data ABK 2017-2018
	11	Koordinasi dengan TU ITTAMA terkait Aplikasi Peta Risiko dan Permintaan data TLHP BPK	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 11 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan • Data TLHP BPK
	12	Penerimaan Data Pagu Anggaran dari Aplikasi Sincan Perencanaan cc. Mas Deni	Kamis, 15 Agustus 2019	Lampiran 12 <ul style="list-style-type: none"> • Screenshot Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Pengawasan Inspektorat II
Membuat peta risiko beserta	13	Pelaksanaan Pembuatan Cloud Irda	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 13 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan

aplikasi pendukungnya	14	Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 14 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	15	Input data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 15 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan Screenshot Aplikasi
	16	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 16 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	17	Bimbingan Kedua Bu Henny	Jumat, 9 Agustus 2019	Lampiran 17 <ul style="list-style-type: none"> Kartu Kendali Foto Kegiatan
	18	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI	Selasa, 13 Agustus 2019	Lampiran 18 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	19	Uji coba peta risiko serta penyebaran form evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 19 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan Form Evaluasi
	20	Menerima dan menganalisa hasil evaluasi yang telah diisi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 20 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan Form Evaluasi yang telah diisi oleh auditor Inspektorat II
Melaporkan hasil akhir kegiatan	21	Sosialisasi aplikasi peta risiko di Lingkungan Inspektorat II	Senin, 26 Agustus 2019	Lampiran 21 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan Undangan Rapat Absensi Rapat Laporan Singkat

BAB III PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

A. KEGIATAN:

Kegiatan 1: Presentasi Singkat Rancangan Kegiatan di Hadapan Bpk. Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II dan Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis setelah melaksanakan sidang akhir rancangan di Wisma Giryas Sabha Kopo adalah menghadap dan melaksanakan presentasi singkat di hadapan Plt. Inspektur II yaitu Bpk. Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Hal ini dilakukan agar pucuk pimpinan mengetahui, penulis akan menjalankan habituasi selama 30 hari di unit Inspektorat II.



Gambar 1: Koordinasi dan Presentasi Singkat dengan Inspektur Utama merangkap Plt Inspektur II

Penulis berencana untuk mengaktualisasikan hasil rancangan penulis yang berjudul "Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II" dimana hal tersebut beranjak dari 3 isu yang dianggap *urgent* oleh penulis yang berada di dalam unit Inspektorat II itu sendiri. Isu yang pertama adalah belum adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang kedua belum optimalnya penyusunan kebijakan pengawasan dan SOP di lingkungan Inspektorat Utama Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan yang ketiga belum adanya nilai risiko *auditable units*. Untuk memilih salah satu dari ketiga isu tersebut dilakukan teknik analisis *Urgency, Seriousness, Growth (USG)* yang pada akhirnya mengarah kepada isu nomor 3 yaitu belum adanya nilai risiko *auditable units*, di samping itu juga penulis sudah berkordinasi dan melaksanakan konsultasi terhadap mentor terkait pemilihan isu tersebut. Untuk lebih menunjang fleksibilitas dalam pelaksanaan habituasi sebagai dasar koordinasi dengan instansi lain, maka penulis pun membuat Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi yang ditandatangani oleh Bpk Plt. Inspektur II pada hari tersebut:

Step kedua dalam pelaksanaan percepatan penyusunan aplikasi peta risiko dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yaitu dengan Bapak Airlangga Eka Wardhana, S. Kom., M.T.I., yang dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019 di ruang Rapat Pusdiklat lantai 4 gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam koordinasi dengan pihak BDTI ini dilakukan secara kolektif dengan 15 peserta CPNS Angkatan II Golongan III Tahun 2019 yang mempunyai rencana aktualisasi secara khusus berhubungan dengan pihak BDTI.

Dalam koordinasi tersebut penulis menyampaikan maksud dan tujuan dari proyek aktualisasi yang akan dilaksanakan dimana penulis bermaksud membuat suatu aplikasi khusus terkait peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II dengan sistem operasional mengadopsi beberapa fungsi dari Microsoft Excel. Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, M.T.I., sebagai perwakilan



Gambar 3: Koordinasi dengan BDTI

sebuah nilai yang berdasar pada kriteria yang ditentukan pada saat awal. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi para auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dan memudahkan dalam hal record dan input data terkait peta risiko dari sudut pandang auditor, sehingga para auditor dapat terbantu untuk merumuskan Program Kerja Pengawasan



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAL. KHOSROW KARDI SURABAYA JAWA BARU 60132
Telp. (031) 6713 343 FAX. (031) 6713 422 - 6713 426 www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN NOMOR: 015689/2019

Yang beranda tangan di bawah ini, PK, Inspektur II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fatah Riyadi, S.E.
NIP : 196011230019031001
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat II
Mentor : Eriwan Adhapi Nams, S.E., M.A.P.

Adapun dasar CPNS Golongan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (DPR RI) yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 22 Juli - 30 Agustus 2019. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah merumuskan Pengawasan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.

Dumikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Auditor Kepala

Eriwan Adhapi Nams, S.E., M.A.P.
NIP. 196011230019031004

Jakarta, 23 Juli 2019
PK, Inspektur II

Drs. Setiawan Nurstika, M.M.
NIP. 1962111819556031001

Gambar 2: Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi

dari pihak BDTI menjelaskan bahwa pembuatan aplikasi peta risiko bisa saja dilakukan dan tentunya akan sangat bermanfaat di era digital saat ini dalam memudahkan suatu pekerjaan. Penulis juga menambahkan akan ada beberapa input data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut dan akan melalui proses kalkulasi serta pengelompokkan ke dalam

Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan juga dalam melaksanakan kegiatan audit yang berbasis risiko.

Dalam pembahasan lebih lanjut terkait percepatan penyusunan aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II yang mana dimulai dengan presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Inspektur Utama merangkap Plt. Inspektur II, koordinasi dengan pihak Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) serta bimbingan pertama dengan coach Ibu Heny Widyaningsih merupakan penerapan nilai ***whole of government (WoG)*** sebagai hubungan lintas sektor Bidang untuk menciptakan sistem pengawasan internal pada area pengawasan Inspektorat II. Adanya aplikasi peta risiko merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi internal Inspektorat II dalam memberikan pelayanan dan



Gambar 4: Bimbingan Pertama dengan coach

tanggung jawab kepada pimpinan dalam penentuan unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat II mana yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan kegiatan pengawasan di dalamnya, hal ini merupakan cerminan dari nilai **akuntabilitas dan komitmen mutu** yang ditanamkan di unit Inspektorat II dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan lain memetakan risiko dari sudut pandang auditor terhadap unit-unit yang berada di bawah pengawasannya.

Kegiatan 2: Melaksanakan Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II

Kegiatan pertama ini diawali dengan melaksanakan rapat internal dengan jajaran Inspektorat II yang terdiri dari para auditor madya, utama, dan pertama serta CPNS yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Inspektorat II Lantai 5 Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, rapat internal dilakukan dalam pertemuan yang bersifat informal dan membahas beberapa hal yang terkait dengan Percepatan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.



Gambar 5: Rapat Internal dengan Jajaran Inspektorat II

Tantangan utama yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan audit pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Audit intern berbasis risiko merupakan sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan kerangka manajemen risiko keseluruhan organisasi pemerintahan di mana auditor tersebut bertugas. Perencanaan audit intern berbasis risiko didasarkan pada tujuan organisasi birokrasi pemerintahan serta pelaksanaan audit yang memberikan keyakinan bahwa, melalui pengendalian intern, seluruh risiko yang mengancam tujuan instansi/lembaga pemerintah telah dimitigasi ke tingkat yang dapat diterima sehingga tujuan dapat tercapai. Perencanaan audit intern berbasis risiko memungkinkan APIP untuk memberikan jaminan atau asurans kepada pimpinan instansi/lembaga pemerintah bahwa proses manajemen risiko telah menghasilkan tata kelola risiko yang efektif dan telah mempertimbangkan selera risiko yang ditetapkan. Perencanaan audit intern berbasis risiko merupakan perluasan dan penyempurnaan dari

sistem audit tradisional yang lebih menekankan audit pada pengendalian intern semata dan melaporkan kecukupan dan efektivitas dari pengendalian intern saja. Untuk itu dibutuhkan suatu peta risiko dari sudut pandang auditor sebagai langkah awal untuk mencapai audit intern berbasis risiko.

Dalam pembahasan konsep penyusunan aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II para auditor di jajaran inspektorat II sangat mendukung dan siap membantu dalam mensukseskan aktualisasi yang akan diimplementasikan oleh penulis. Dalam rapat konsolidasi internal ini menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa akan dibentuk sebuah aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II dengan memakai tiga faktor risiko yaitu, dilihat dari sudut pandang anggaran yang dikelola oleh 10 Biro yang berada di bawah pengawasan Inspektorat II , jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Analisis Beban Kinerja (ABK) dilihat dari selisih dari jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan jumlah pemangku kepentingan. Berikut konsep aplikasi peta risiko yang dihasilkan melalui persetujuan konsolidasi internal Inspektorat II:

PETA RISIKO 2019													
Inspektorat II													
NO	KODE UNIT	UNIT / BIRO	ANGGARAN 2019			TLHP BPK		SDM					
			TOTAL	URAIAN	BOBOT	URAIAN	BOBOT	JUMLAH PEMANGKUP	KEBUTUHAN PEJAWAT	SELISIH	URAIAN	BOBOT	
1	5783	Biro Perencanaan I	472.103.622,000	Di atas 100 Milyar	4	80% atau lebih	1	132	271	118	181.200	3	1
2	5782	Biro Perencanaan II	140.826.434,000	Di atas 100 Milyar	4	80% atau lebih	1	54	66	12	0-50	1	4
3	5781	Biro Kerjasama Antar Parlemen	88.030.872,000	51-100 Milyar	3	80% atau lebih	1	41	52	11	0-50	1	5
4	5784	Biro Koordinasi dan Pengawasan	314.879.261,000	Di atas 100 Milyar	4	80% atau lebih	1	105	144	39	0-50	1	3
5	5785	Biro Pendidikan dan Pelatihan	185.952.862,000	Di atas 100 Milyar	4	80% atau lebih	1	58	130	271	181.200	4	2
6	5796	Pusat Perencanaan UU	17.802.702,000	10-50 Milyar	2	80% atau lebih	1	66	81	15	0-50	1	6
7	5797	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Petak Kewenangan UU	12.785.996,000	10-50 Milyar	2	80% atau lebih	1	23	35	12	0-50	1	8
8	5798	Pusat Kajian Anggaran	5.254.830,000	Di bawah 10 Milyar	1	80% atau lebih	1	27	47	20	0-50	1	9
9	5799	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	1.013.533,000	Di bawah 10 Milyar	1	80% atau lebih	1	15	19	4	0-50	1	10
10	5800	Pusat Penelitian	14.656.277,000	10-50 Milyar	2	80% atau lebih	1	96	122	16	0-50	1	7

Gambar 6: Konsep Aplikasi Peta Risiko

Dengan kriteria risiko sebagai berikut:

Konsep aplikasi peta risiko pada area pengawasan inspektorat II merupakan bentuk dari pembaharuan (inovasi) agar perencanaan audit intern ke depannya berbasis kepada risiko sehingga menghasilkan

suatu kegiatan audit yang efektif, efisien dan merupakan suatu peningkatan komitmen mutu di unit Inspektorat II. Dalam kegiatan rapat internal ini pun nasionalisme tercermin pada konsolidasi yang dilakukan secara penuh

NO	URAIAN	URAIAN	Nilai Skor
1	Anggaran Yang Dikelola	Di bawah 10 Milyar	1
		10-50 Milyar	2
		51-100 Milyar	3
		Di atas 100 Milyar	4
2	Kepegawaian	0-50	1
		51-100	2
		101-200	3
		Di atas 200	4
3	Jumlah TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) BPK	80% atau lebih	1
		41% - 80%	2
		21% - 40%	3
		0% - 20%	4

Gambar 7: Konsep Daftar Kriteria Risiko

nuansa kekeluargaan dan musyawarah mufakat dalam rangka mencapai kesepakatan terkait penyusunan aplikasi peta risiko dan penentuan kriteria-kriteria yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi tersebut, hal tersebut juga mencerminkan nilai **whole of government**. Dalam pelaksanaan rapat pun tata krama, sopan santun, dan komunikasi yang baik diimplementasikan sebagai wujud internalisasi dari nilai **etika publik** di dalamnya.

Manfaat dari penyusunan aplikasi peta risiko adalah untuk memudahkan Inspektorat II dalam mengidentifikasi risiko dari setiap auditi yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi landasan bagi Inspektorat II dalam menjalankan audit yang berbasis risiko, serta memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan auditi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kegiatan 3: Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko

Dalam pengumpulan data penunjang, maka yang penulis lakukan pertama kali adalah mengkonsep nota dinas terkait permintaan data ke



Gambar 8: Surat Permintaan Data ke Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 9: Surat Permintaan Data ke Biro Kepegawaian

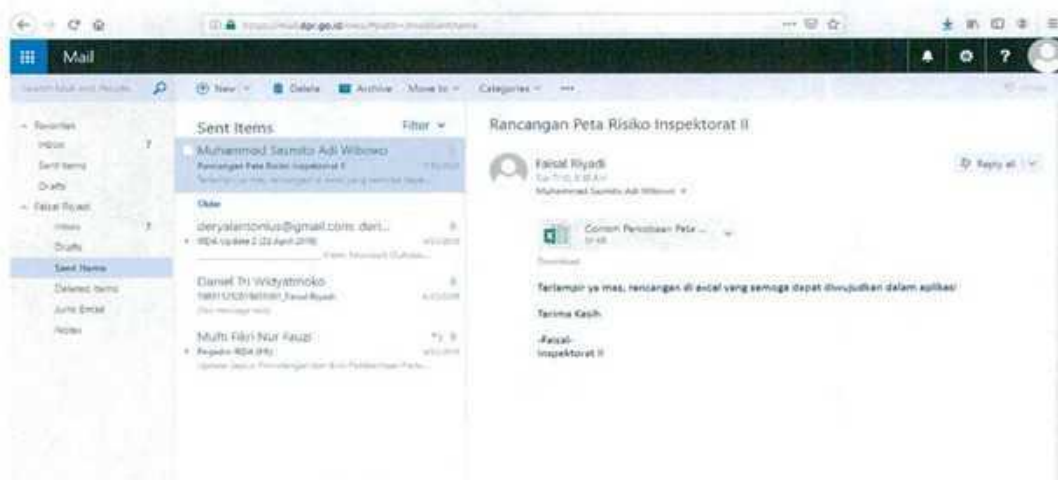
Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Kepegawaian terkait data anggaran yang dikelola oleh 10 Biro di bawah area pengawasan Inspektorat II periode 2017-2019, Analisis Beban Kinerja (ABK) tahun anggaran 2017-2019, serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK di 10 Biro dari

area pengawasan Inspektorat II. Proses pembuatan dan pengiriman nota dinas permintaan data dilaksanakan pada hari Senin, pada tanggal 29 Juli 2019. Pada tahapan ini penulis melakukan koordinasi dengan unit lain, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan serta Biro Kepegawaian. Komunikasi dijalin dengan rasa sopan santun, dan sesuai dengan prosedur birokrasi yang ada sebagai internalisasi dari nilai **etika publik** di dalamnya.

Manfaat dari pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko ini adalah sebagai bahan input pengolahan data di dalam aplikasi tersebut, dimana data-data yang valid tersebut dapat merepresentasikan hasil dari pemetaan risiko dari sudut pandang auditor, agar tercapai kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, hal tersebut sebagai implementasi dari nilai **komitmen mutu** dan juga **akuntabilitas**.

Kegiatan 4: Membuat Peta Risiko Beserta Aplikasi Pendukungnya

Dalam melaksanakan proses pembuatan peta risiko, penulis berusaha mengintegrasikan antara 3 indikator yang telah disepakati di internal Inspektorat II dengan kriteria yang telah ditentukan ke dalam suatu aplikasi hasil kolaborasi penulis dengan pihak Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI).



Gambar 10: Pengiriman Rancangan Aplikasi Peta Risiko via Email DPR kepada BDTI

Pembuatan aplikasi peta risiko ini dilaksanakan menyesuaikan dengan timeline yang telah ditentukan oleh penulis pada saat rancangan, dimulai pada Minggu ke-5 Juli 2019 – Minggu ke-3 Agustus 2019.

Pada pelaksanaan pembuatan aplikasi, pihak BDTI mengacu kepada rancangan konsep yang telah disharing oleh penulis dan juga melalui proses komunikasi internal.

Di tengah proses pengerjaan itu, penulis pun mencoba membuat plan B terkait dengan penyusunan aplikasi peta risiko ini, apabila di tengah jalan proses pengerjaan aplikasi tersebut tidak memungkinkan untuk selesai di akhir periode, rencana cadangan dalam penyusunan aplikasi peta risiko tersebut diaplikasikan dengan memanfaatkan microsoft platform, yaitu microsoft excel yang akan diintegrasikan ke dalam cloud DPR Inspektorat II. Setelah dilakukan analisis, ternyata Inspektorat II belum mengaktifkan cloud DPR ke Bidang Data dan Informasi (BDTI). Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, penulis mengkonsep Nota Dinas dan ditandatangani langsung oleh Plt. Inspektur II dalam hal Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II, kemudia nota dinas tersebut dikirimkan pada hari yang sama ke bidang terkait, yaitu BDTI.



Gambar 11: Surat Permintaan Pembuatan Cloud Irda

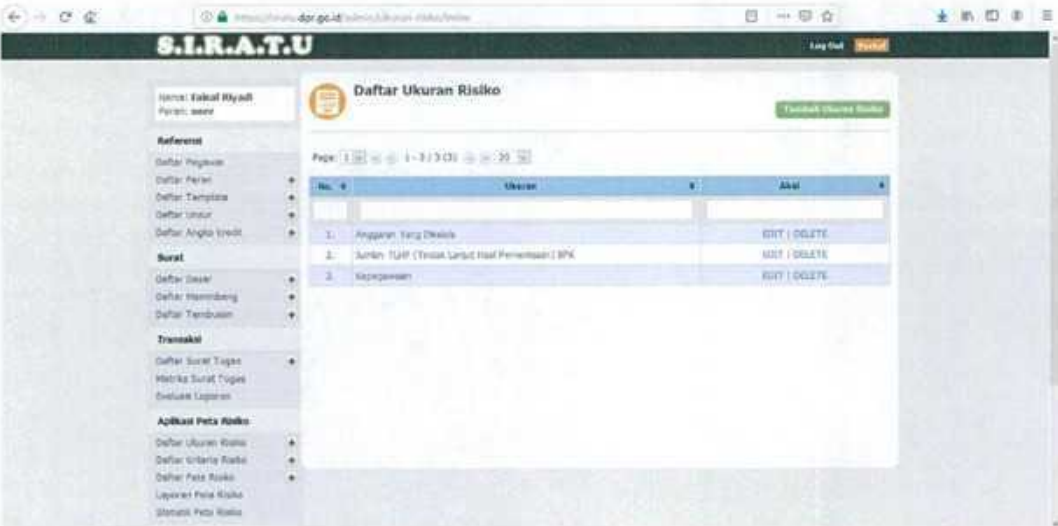
Eka Wardhana, S. Kom., M.T.I., Rekan-rekan BDTI, 15 peserta CPNS Angkatan II Golongan III Tahun 2019 yang mempunyai rencana aktualisasi secara khusus berhubungan dengan pihak BDTI. Pada kesempatan tersebut pihak BDTI memaparkan hasil pekerjaan dari suatu rancangan aktualisasi yang mengacu kepada sistem aplikasi dan elektronik. Aplikasi Peta

Pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, Biro Kepegawaian cc Bagian Ortala melalui Sdri Santi Girsang mengirimkan file ABK dari tahun 2017-2019. Data langsung dikirim melalui email dpr: faisal.riyadi@dpr.go.id, sesuai dengan alamat pengiriman yang tertera di surat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, penulis dan pihak BDTI melaksanakan Rapat Koordinasi Tahap II dengan Pihak BDTI. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Bpk. Rusmanto, Bapak Airlangga



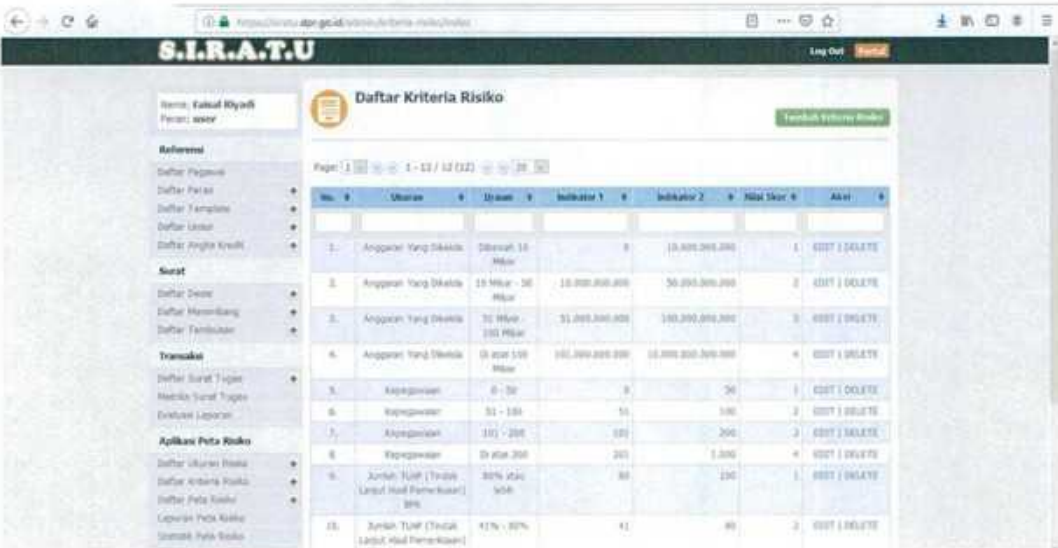
Gambar 12: Rapat Koordinasi Tahap II dengan pihak BDTI

Risiko yang terealisasi dibuat menjadi *accessible* dan terintegrasi dengan aplikasi SIRATU (aplikasi proper ITTAMA dalam hal tata kelola surat tugas). Aplikasi peta risiko berada pada subkolom Intern pada aplikasi SIRATU, Berikut: halaman interface aplikasi Peta Risiko tersebut disertai dengan kegunaannya:



Gambar 13: Daftar Ukuran Risiko

Sub daftar yang pertama adalah Daftar Ukuran Risiko yang berisi 3 faktor risiko, yaitu anggaran yang dikelola, jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK, dan jumlah Analisis Beban Kinerja (ABK) yang berada pada area pengawasan Inspektorat II, yaitu 10 Biro, unit, dan pusat.



Gambar 14: Daftar Kriteria Risiko

Sub daftar yang kedua adalah Daftar Kriteria Risiko yang berisikan penjelasan kriteria-kriteria dari faktor risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Daftar Kriteria Risiko ini merupakan landasan yang penting dalam penentuan bobot dari 3 kriteria pada 10 biro/unit/pusat. Kemudian pada sub daftar ketiga yaitu Daftar Peta Risiko yang berisi penjelasan faktor risiko yang ada pada setiap biro/unit/pusat.

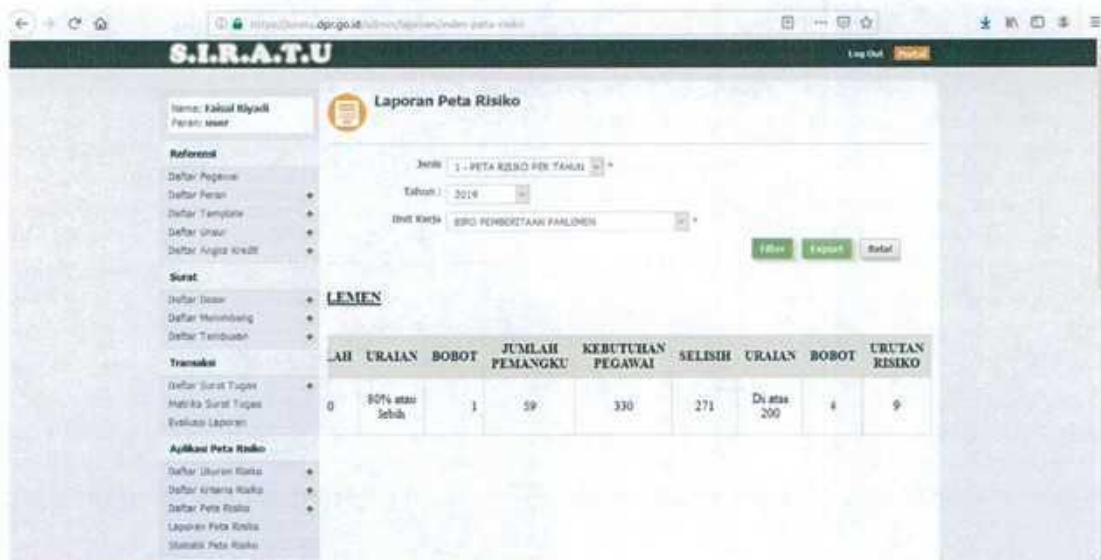
No	Tahun	Unit Kerja	Kriteria	Jumlah	Total	Bobot	Aksi
1.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	Anggaran Yang Dibekal	RAK 31 RAK 32 SETER RAK 33 RAK 34 RAK 35 RAK 36	23.822.481.000	2	EDIT DELETE
13.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	Kepengawasan	Jumlah Perangko Kebudayaan Pegawai	41 32	11	EDIT DELETE
23.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	Jumlah TAP (Tidak Larut Hasil Pembiayaan) BPH	100%	100	3	EDIT DELETE
33.	2019	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	Anggaran Yang Dibekal	RAK 31 RAK 32 SETER	23.822.481.000	2	EDIT DELETE

Gambar 15: Daftar Peta Risiko

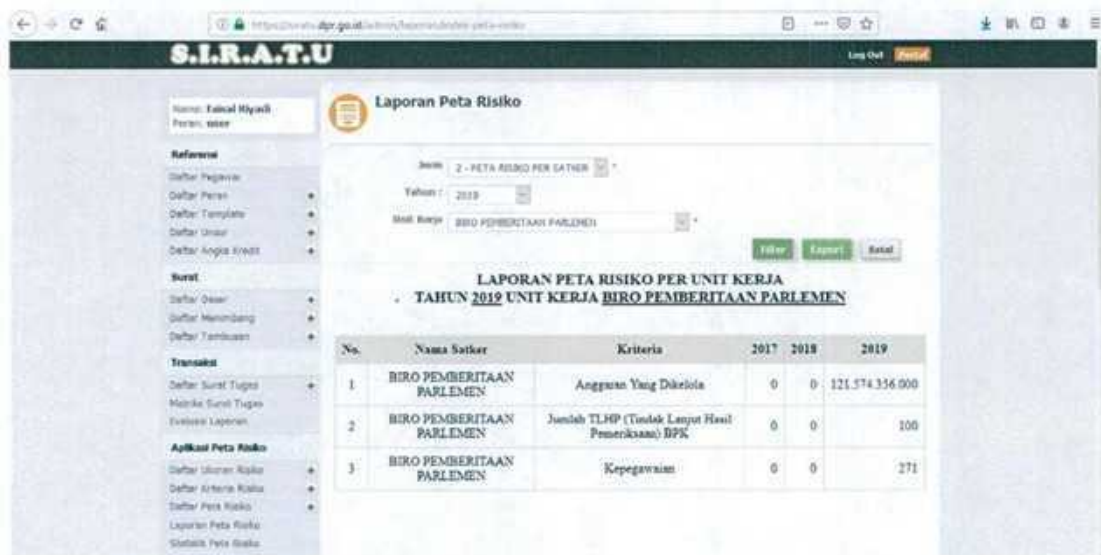
Selanjutnya dari Daftar Peta Risiko tersebut akan diolah kedalam satu sheet khusus yang menggabungkan bobot penilaian dari setiap Biro/Unit/Pusat ke dalam suatu pemeringkatan berdasarkan total bobot yang paling tinggi yang berarti menjadi prioritas kegiatan pengawasan untuk dimasukkan ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) di tahun yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat pada sub daftar yang keempat, yaitu Laporan Peta Risiko.

NO	KODE UNIT	UNIT / BIRO	TOTAL	URAIAN	BOBOT	JUMLAH	URAIAN	BOBO
1.	3783	BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN	121.574.356.000	Di atas 100 Milyar	4	100	80% atas lebih	

Gambar 16: Laporan Peta Risiko Per Tahun 1



Gambar 17: Laporan Peta Risiko Per Tahun 2



Gambar 18: Laporan Peta Risiko Per Satker

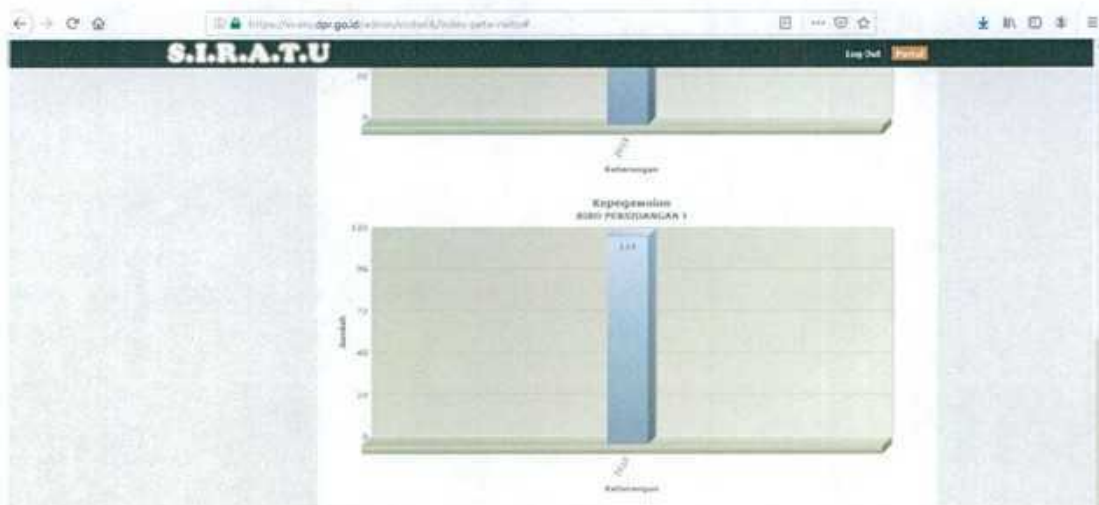
Semua rangkaian tersebut akan dapat dilihat melalui grafik yang dapat kita lihat pada sub daftar yang kelima, yaitu Statistik Peta Risiko.



Gambar 19: Statistik Per Anggaran Yang Dikelola



Gambar 20: Statistik Per Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK



Gambar 21: Statistik Berdasarkan Kepegawaian

Dalam rangkaian proses pembuatan aplikasi ini, penulis melaksanakan komunikasi yang efektif, dan efisien sesuai dengan nilai- nilai **komitmen mutu** serta menerapkan proses berpikir yang inovatif dan kreatif demi menunjang proses kegiatan pengawasan yang semakin baik kedepannya bagi unit Inspektorat II. Di samping itu prinsip **akuntabilitas** dalam pemaparan data risiko yang ada di setiap area pengawasan Inspektorat II, menghasilkan harmonisasi peringatan pencegahan bagi unit yang akan diawasi.

Kegiatan 5: Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko

Uji coba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di ruang kerja Inspektorat II kepada para auditor yang berada di unit Inspektorat II.

Pembuatan form evaluasi dilaksanakan pada hari yang sama dan langsung disebar kepada para auditor sebagai *recipient*.



Gambar 22: Uji Coba Aplikasi Peta Risiko dan Penyebaran Form Evaluasi

Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 23 Agustus 2019 dilaksanakan evaluasi terhadap hasil tersebut, sebagai bahan masukan terhadap finalisasi aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II.



Gambar 23: Analisa Form Evaluasi

komitmen mutu dalam hal identifikasi risiko terhadap biro/unit/pusat yang berada di bawah area pengawasan Inspektorat II.

Dalam tahapan ini penulis melaksanakan koordinasi dengan sesama auditor sebagai pengguna aplikasi ke depannya. Penulis melaksanakan komunikasi yang baik dan menerima masukan yang positif demi terwujudnya **akuntabilitas** peta risiko serta

Kegiatan 6: Melaporkan Hasil Akhir Kegiatan

Pada tahap akhir ini, penulis memaparkan hasil dari rancangan aktualisasi yang berusaha direalisasikan pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari di depan para auditor Inspektorat II. Output akhir yang didapat setelah melalui 5 step kegiatan di awal dipertanggung jawabkan di dalam kegiatan akhir ini. Sosialisasi dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 di Ruang Rapat Inspektorat II Gedung Setjen dan BK DPR RI Lantai 5.



Gambar 24: Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko di Lingkungan Inspektorat II

Pada sosialisasi akhir ini, penulis menjelaskan pentingnya aplikasi ini sebagai awalan dalam penentuan nilai *auditable units* pada area pengawasan Inspektorat II, tata kelola risiko yang rapi serta terstruktur akan semakin menunjang kinerja kegiatan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Inspektorat II. Penulis mengimplementasikan komunikasi yang baik demi terwujudnya output yang efektif dan efisien yang terintegrasi dengan nilai **akuntabilitas** dan **komitmen mutu** demi terwujudnya lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terintegrasi dengan nilai **anti korupsi**.

B. STAKEHOLDER

No	Stakeholder	Peran
1.	Para Pejabat dan Auditor di Lingkungan Inspektorat II	Pelengkap Informasi
2	TU ITTAMA	Pendukung Data Pendukung Administrasi
3	Biro Kepegawaian	Supporting Data Tentang ABK
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	Supporting Data Tentang Anggaran
5	BDTI	Supporting IT

C. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Tabel 5. Analisis Dampak Internal dan Eksternal Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

<i>Internal</i>	<i>Eksternal</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Tidak terlaksananya sistem audit berbasis risiko</i> <i>Tidak tersusunnya program kerja pengawasan tahunan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Memberi celah kepada oknum dalam melakukan praktik-praktik menyimpang yang dapat berindikasi terhadap temuan BPK</i> <i>Kinerja Instansi/Lembaga dapat berpotensi Menurun</i>

*Inspektorat II yang
berbasis risiko*

- *Dapat bergesernya Opini BPK dari "Wajar Tanpa Pengecualian" menjadi "Wajar Dengan Pengecualian"*

D. TIME SCHEDULE

Tabel 6. Timeline Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan	Juli 2019		Agustus 2019				
	Week		Week				
	4	5	1	2	3	4	5
Rapat dengan jajaran Internal Inspektorat II							
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)							
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko							
Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya							
Melakukan uji coba dan Evaluasi Peta Risiko beserta aplikasi pendukungnya							
Melaporkan hasil akhir kegiatan							

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penulis telah melaksanakan kegiatan aktulisasi pada masa habituasi selama 30 hari di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dalam pelaksanaan tersebut telah diimplementasikan nilai aneka di dalamnya.
2. Inspektorat II selaku unit terkait sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh penulis, karena dapat mempermudah dan menunjang kinerja auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang berbasis risiko.
3. Ide awal penulis telah berkembang hingga menjadi aplikasi, hal itu atas dasar pemenuhan saran dan masukan dari *coach* dan penguji, walaupun dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak tahapan, tetapi penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

B. SARAN

Hasil proses perencanaan audit intern tahunan adalah daftar *auditable units* terpilih, disusun dalam berdasarkan urutan signifikansi atau prioritasnya yang memerlukan asurans dan penyempurnaan atas sistem manajemennya. Dengan menetapkan urutan klien berdasarkan prioritasnya, penugasan diharapkan akan menghasilkan usulan perbaikan yang memberi nilai tambah yang optimal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi. Dengan demikian, aktivitas audit akan lebih tepat sasaran, berdasarkan risiko dan mampu memberikan keyakinan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan klien akan dapat tercapai.

LAMPIRAN KEGIATAN

A. LAMPIRAN 1

Foto" Presentasi singkat rancangan rencana kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019":



B. LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan Sudah di TTD oleh Bapak Inspektur Utama pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
NOMOR: IP/196/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, PIt. Inspektur II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Faisal Riyadi, S.E.
NIP : 198911232019031001
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat II
Mentor : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.

Adalah benar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 22 Juli – 30 Agustus 2019. Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Auditor Madya

Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP. 196907151999031004

Jakarta, 22 Juli 2019
Pit. Inspektur II

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001

C. LAMPIRAN 3

Foto Kegiatan:



Kartu Kendali:

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PESERTA

KARTU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN 2 TAHUN 2019

Nama : Faisal Riyadi
Instansi : Setjen dan BK DPR RI
NIP. : 19891123 201903 1 001

Nama Coach : Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	25/07/2019	Kordinasi Rapat	Tatap Muka	membuat surat undangan rapat	he
2					
3	09/08/2019	Pengolahan Data	Tatap Muka	memilih periode data anggaran	he
4					
5	27/08/2019	Diklati Software	Tatap Muka	upgrade info di sub tabel	he
6	30/08/2019	Kordinasi Laporan	Tatap Muka	update tabel laporan aktualisasi	he
7					
8					
9					
10					
11					
12	Dst..				

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH

D. LAMPIRAN 4

Foto Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : IP/198/VII/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan

24 Juli 2019

Yth.

1. Inspektur I
 2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
 3. Para Kasubag TU Inspektorat Utama
 4. Auditor Inspektorat II
 5. JFU Inspektorat Utama
- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
Pukul : 10.00 WIB
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001

Absensi Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:
















**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II
Acara : Rapat Koordinasi
Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. SETYANTA NUGRAHA, M.M.	INSPEKTUR UTAMA	
2.	Dr. DEWI BARLIANA S., M.Psi., CIA.	INSPEKTUR I	
3.	HANAFIAH, S.Sos.	KASAG TU ITTAMA	
4.	ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
5.	AFNIWATY TANJUNG, S.E., M.E.	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.	TIMBANG SUPRIYANTO, S.Sos.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.	ENDEN ADIPATI KOMA, S.E., M.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
8.	DENI WIBISONO, S. Hul., M. Si., Cfr.A.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
9.	HASNELSON, SH.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
10.	NURHARIYANI S.E., M.M.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
11.	DENNY RAMADON, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
12.	TARYONO, S.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
13.	MARGARETHA SUSANTI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
14.	FAISAL RIYADI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
15.	FITRIYANI LESTARI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
16.	MUFTI FIKRI NUR FAUZI, A. Mdi.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
17.	PUTRI WIDYASARI NOVIYANTO, A. Mdi.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
18.	RETI ARDIYANTI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
19.	SRI NASTITI TRI NURASHI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
20.	HARYANTI	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	

21.	ANA MUTA'AFFIF	PENGADMINISTRASI UMUM	
22.	INDAH TUSILA WATI	PENGADMINISTRASI UMUM	
23.	SRI REJEKI, S.E	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
24.	MUHAMAD ALI, S.Sos.	PENGELOLA DATA	
25.	SURETANTO, S.Kom.	PENGELOLA DATA	
26.	ANTONIUS DERYAL G., S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
27.	ALISA FATIMAH, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
28.	DYATRI MICKY ANGGRITA, S.I.P	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
29.	MUHAMMAD ILHAM ANTARIKSA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
30.	ZELKA SEVRINA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
31.	ZAHRA WANISA, S. IAH.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
32.	ARIZAL MASHUDI, A.Md	PENGELOLA DATA	
33.	MIKHAIL MUHAMAD JIBRIL, A.Md., Ak.	PENGELOLA DATA	
34.	REZA PRISCIA NANDA, A.Md	PENGELOLA DATA	
35.	FIROSA SIREZIA, S.E.	PENGELOLA DATA	
36.	Selnot Am Sartini	—	

Laporan Singkat Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko
Inspektorat II pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KOORDINASI PENYUSUNAN PETA RISIKO INSPEKTORAT II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juli 2019
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 5
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
Ketua Rapat : Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
Koordinator : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P (Auditor Ahli Madya Inspektorat II)
Penyaji : Faisal Riyadi (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II)
Hadir : 1. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II
2. Rekan-Rekan Tata Usaha Inspektorat II
3. Rekan-Rekan CPNS

PENDAHULUAN

1. Rapat dimulai Pada Hari Senin, 25 Juli 2019 pukul 10.00 WIB dibuka oleh Plt. Inspektur II Bapak Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
2. Dilanjutkan oleh Bapak Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P. Selaku Koordinator Rapat.
 - a. Koordinator membuka rapat dengan menyampaikan pengantar:
 - 1) Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan aktualisasi pelatihan dasar, sdr. Faisal Riyadi.
 - 2) Bahwa sdr. Faisal Riyadi selaku Auditor Ahli Pertama telah melaksanakan pelatihan dasar selama 3 minggu di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI.

- 3) Upload aplikasi ke DPR Cloud Inspektorat II.
3. Kesimpulan Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Penyusunan Aplikasi Peta Risiko di Area Pengawasan Inspektorat II yaitu :
- a) Jajaran Inspektorat II sudah mengetahui mengenal rancangan aktualisasi yang sedang disusun oleh Sdr. Faisal Riyadi.
 - b) Rencana kegiatan yang sudah disusun disesuaikan dengan jangka waktu habituasi yang hanya berlangsung selama 30 hari.
 - c) Surat Permohonan permintaan data agar dipersiapkan dari sekarang untuk segera dikirim pada minggu ke-5 Bulan Juli 2019.
 - d) Pembuatan surat permohonan pembuatan DPR Cloud Inspektorat II dari Plt. Inspektur II kepada Kepala BDTI.
 - e) Diharapkan DPR Cloud Inspektorat II dapat terealisasi pada minggu ke-1 Bulan Agustus 2019, agar nantinya dapat dikoneksikan dengan rancangan aplikasi peta risiko.
 - f) Perkuat koordinasi dengan mentor dan *coach*, agar laporan aktualisasi kegiatan dapat terealisasi beserta hasilnya.
3. Rapat ditutup pada Pada Pukul 12.05 WIB.

Jakarta, 25 Juli 2019
Plt. Inspektur II,


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP.196207191988031001

E. LAMPIRAN 5

Foto Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019:



Absensi Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II:






**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SI, BROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 926 LAMAN : www.dpr.go.id

Daftar Hadir Peserta
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusdiklat

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Esther Putri Lasmada Panjaitan	Pusat Perancangan Undang-Undang	1.
2.	Hesekiol Marudul Worsu	Inspektorat I	2.
3.	Dandy Adrian Azkara	Pusat Penelitian	3.
4.	Tasya Annani Putri	Tu Pusat PUU	4.
5.	Yudi Pravia	BKSAP	5.
6.	Nala Anasiya	Bagian Kepegawaian	6.
7.	Richa Khairunnisa	Bagian Pengaduan Masyarakat	7.
8.	Muhammad Irando	Bagian Sekretariat Komisi III	8.
9.	Rafaini Hasna Ghassani	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	9.
10.	Anisa Rahmasari	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	10.
11.	Burhanudin Maturahman	Pusat Penelitian	11.
12.	Destya Andini	Sekretariat Komisi V	12.

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
13.	Faisal Riyadi	Inspektorat II	13 
14.	Yusuf Setro Pambudi	Unit Layanan Pengadaan	14 
15	Ritesa Ardiansyah	Badang Pelaksanaan Caklat	15 

Laporan Singkat Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan II:

LAPORAN SINGKAT RAPAT PEMBUATAN APLIKASI BERSAMA BDTI

Tahun sidang	: 2018 – 2019
Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 27 Juli 2019
Pukul	: 08.30 – 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pusdiklat Gedung Sekretariat Jenderal lantai 4
Acara	: Pembahasan Pembuatan Aplikasi Bagi Proyek Aktualisasi CPNS
Ketua Rapat	: Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
Hadir	: <u>BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</u>

1. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I.
2. Muhammad Sasmito Adi Wibowo, A.Md.
3. Daniel Tri Widiatmoko, A.Md

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.
2. Tasya Armani Putri, S.I.A
3. Ridha Khoirunnisa, S.I.P.
4. Dandy Adrian Azkara, S. E.
5. Yudi Prawira
6. Faisal Riyadi, S.E.
7. Refaini Hasna Ghassani, S. H.
8. Anisa Rahmasari, S. H.
9. Heseziel Marudut Morsa, S.E.
10. Yusuf Satrio Pambudi, S.E.
11. Rhesa Ardiansyah, S.Pd
12. Muhammad Iranda, S.M.
13. Destya Andini, S.E.

I. PEMBUKAAN

1. Kepala Evaluasi Diklat, Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si, selaku Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 08.30 WIB.

II. PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.
2. Masing-masing peserta mengutarakan kepentingannya kepada BDTI dan kemudian dilakukan pendataan sesuai kebutuhan masing-masing untuk ditindak lanjuti.

III. KESIMPULAN

1. BDTI menyatakan dukungan dan siap membantu pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat.

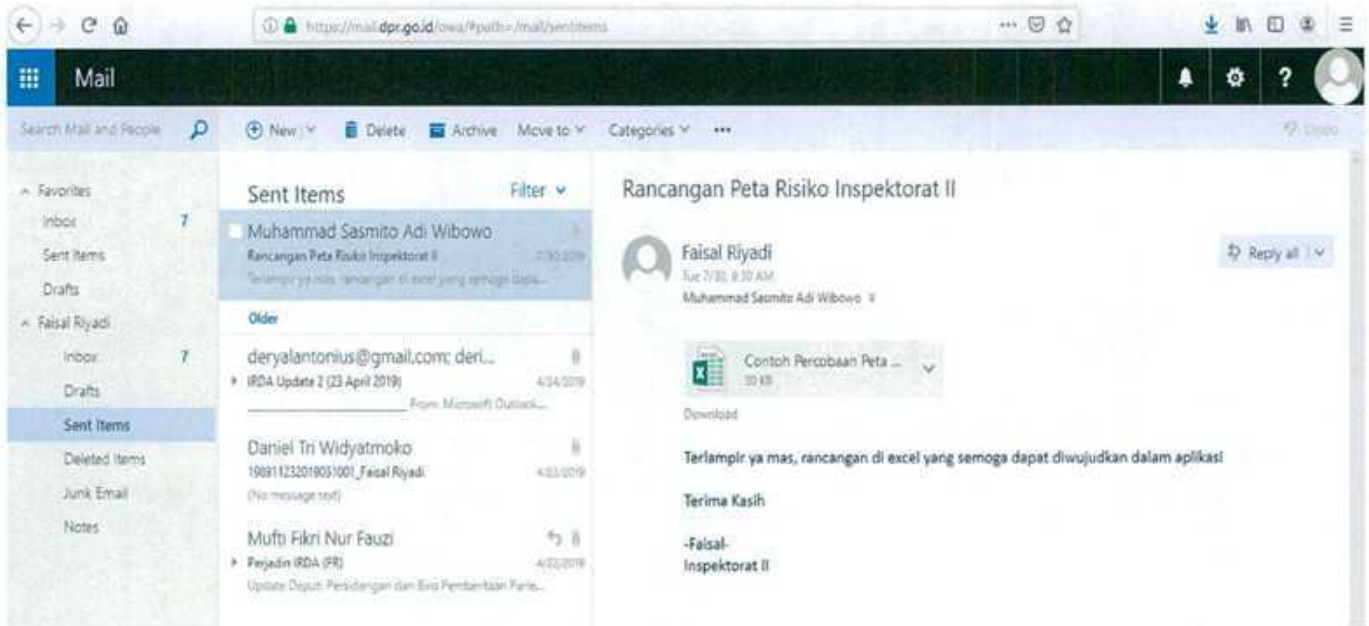
KETUA RAPAT,



Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003

F. LAMPIRAN 6

Mengirim rancangan aplikasi peta risiko via email DPR RI kepada
BDTI cc. Sasmito:



Rancangan aplikasi peta risiko:

DATA PROYEK AKTUALISASI

Nama : Faisal Riyadi
NIP : 198911232019031001
Jabatan : Auditor Ahli Pertama
Unit Kerja : Inspektorat II
Judul Aktualisasi : "Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II"
Nama Proyek Aktualisasi : Aplikasi Peta Risiko Area Pengawasan Inspektorat II
Input : Aplikasi Peta Risiko Area Pengawasan Inspektorat II

- Tabel Peta Risiko
 - Nomor
 - Kode Unit
 - Unit/Biro
 - Anggaran 2019
 - MAK 51
 - MAK 52
 - Setjen
 - Dewan
 - MAK 53
 - Total
 - Bobot
 - TLHP BPK
 - Jumlah
 - Bobot
 - SDM
 - Jumlah Pemangku
 - Kebutuhan Pegawai
 - Selisih
 - Bobot
 - Urutan Risiko
- Tabel Kriteria Risiko
 - Nomor
 - Ukuran
 - Uraian
 - Nilai Skor

Proses : Aplikasi Intranet Dengan Menggunakan *username &*

password yang dapat digunakan oleh para auditor di Inspektorat II

- Edit
- Hapus
- Perhitungan sama seperti excel (tambah, kurang, kali, bagi, IF)

Output

Aplikasi Peta Risiko pada Area Pengawasan
Inspektorat II yang berbasis intranet dengan
menggunakan *username & password*

Contoh Tampilan

[illegible]

G. LAMPIRAN 7

Nota Dinas Permintaan Data Anggaran yang dikelola oleh 10 Biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**NOTA DINAS
NO.IP/199/VI/2019**

Kepada : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Ptl. Inspektor II
Sitat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen
Tanggal : 29 Juli 2019

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan aplikasi peta risiko di area pengawasan Inspektorat II, maka kami membutuhkan beberapa dokumen pendukung yang kami minta dari Bagian Perencanaan, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian beserta jajarannya di bawahnya.
2. Pagu indikatif Tahun 2020 pada Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian beserta jajarannya di bawahnya.

Penyerahan dokumen dapat berupa *softcopy* yang dapat dikirimkan ke alamat email faisal.riyadi@dpr.go.id.

Demikian permintaan kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ptl. Inspektor II

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198803 1 001

Tembusan:

1. Ptl. Deputi Bidang Administrasi
 2. Deputi Bidang Persidangan
 3. Ptl. Kepala Badan Keahlian
- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

H. LAMPIRAN 8:

Nota Dinas Permintaan Data Analisis Beban Kinerja (ABK) mengenai 10 Biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Kepegawaian dan Organisasi:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**NOTA DINAS
NO.IP/200/VII/2019**

Kepada : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Dari : Plt. Inspektur II
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen
Tanggal : 29 Juli 2019

Dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan aplikasi peta risiko di area pengawasan Inspektorat II, maka kami membutuhkan dokumen pendukung yaitu Laporan Analisis Beban Kinerja (ABK) Tahun 2017-2019 yang kami minta dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Penyerahan dokumen dapat berupa *softcopy* yang dapat dikirimkan ke alamat email faisal.riyadi@dpr.go.id.

Demikian permintaan kami sampaikan, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Plt. Inspektur II

Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 19620719 198903 1 001

Tembusan:
Plt. Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

I. LAMPIRAN 9

Nota Dinas Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II:



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NO. IP/206/VII/2019

Kepada Yth : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Plt. Inspektur II
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembuatan Cloud
Tanggal : 31 Juli 2019

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Inspektorat II membutuhkan akun Cloud yang dapat di akses oleh seluruh pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat II.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya saudara dapat menugaskan tenaga teknis untuk membantu pembuatan akun cloud dimaksud.

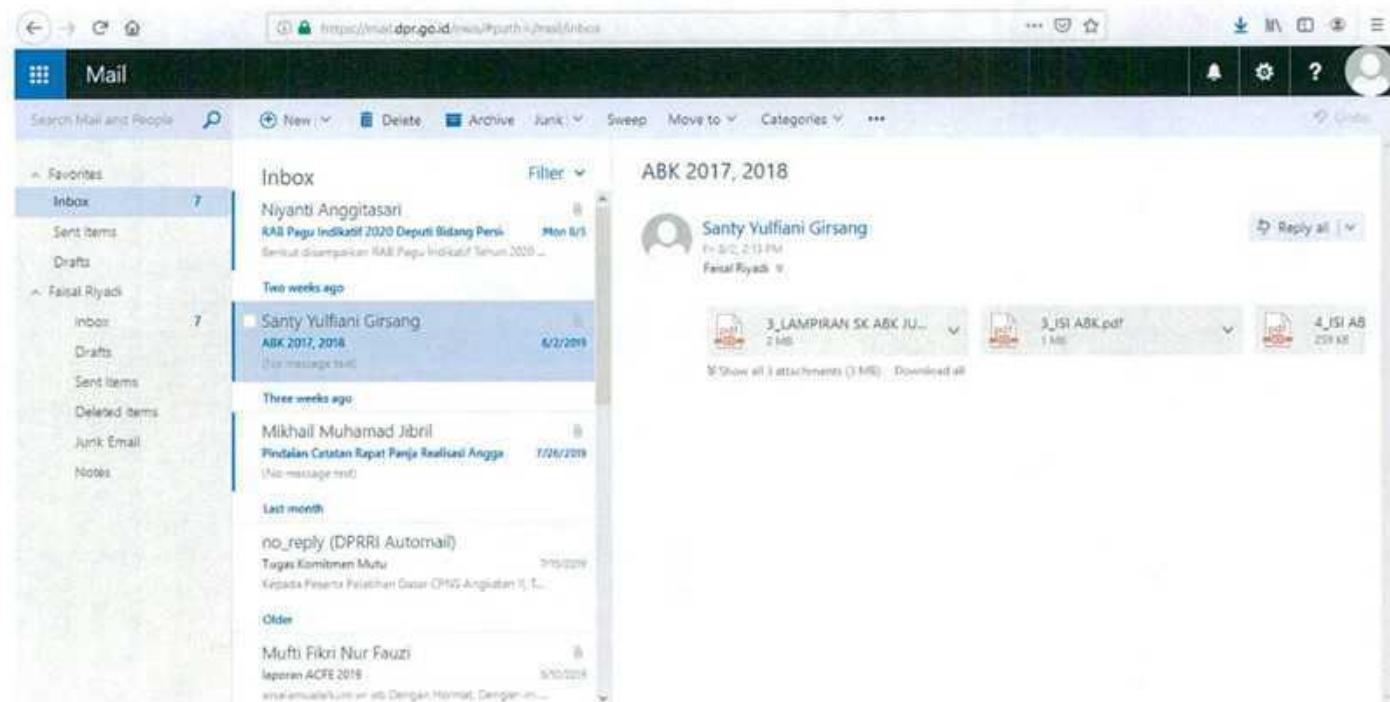
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Plt. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196202491988031001

J. LAMPIRAN 10

Screenshot Email Pengiriman Data ABK 2017-2018:



Data ABK 2017

- 5 -

Pada tahun 2017 ini, Setjen dan BK DPR RI kembali melakukan penghitungan beban kerja. Hal ini dilaksanakan mengingat pada tahun ini, Setjen dan BK DPR RI telah melaksanakan penataan jabatan khususnya nomenklatur jabatan pelaksana yang berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu Setjen dan BK DPR RI juga telah melaksanakan penghitungan kembali beban kerja beberapa jabatan fungsional diantaranya Peneliti, Apoteker, dan Nutrisi. Hasil pengukuran beban kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	
				+	-
1.	Sekretaris Jenderal	1	1	0	0
2.	Deputi Bidang Administrasi	1	1	0	0
3.	Kepala Biro Protokol	28	75	0	47
4.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	24	45	1	22
5.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	119	177	8	66
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	80	107	2	29
7.	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	154	313	14	173
8.	Kepala Biro Umum	188	907	11	730
9.	Deputi Bidang Persidangan	1	1	0	0
10.	Kepala Biro Persidangan I	114	127	4	17
11.	Kepala Biro Persidangan II	46	56	2	12
12.	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	40	55	6	21
13.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	105	135	9	39
14.	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	48	326	2	280
15.	Inspektur Utama	1	1	0	0
16.	Inspektur I	12	30	1	19
17.	Inspektur II	7	30	0	23
18.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	12	31	0	19
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	21	45	0	24
20.	Kepala Pusat Data dan Informasi	94	121	5	32
21.	Kepala Badan Keahlian	1	1	0	0
22.	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	55	80	5	30

Data ABK 2018:

ditindaklanjuti dengan kegiatan analisis jabatan. Selanjutnya jabatan yang telah disusun analisis jabatannya dilakukan penghitungan beban kerja masing-masing jabatan.

Berdasarkan data jumlah pemangku jabatan dari Bagian Kepegawaian per bulan Juni 2018, hasil pengukuran beban kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 sebagaimana tampak pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

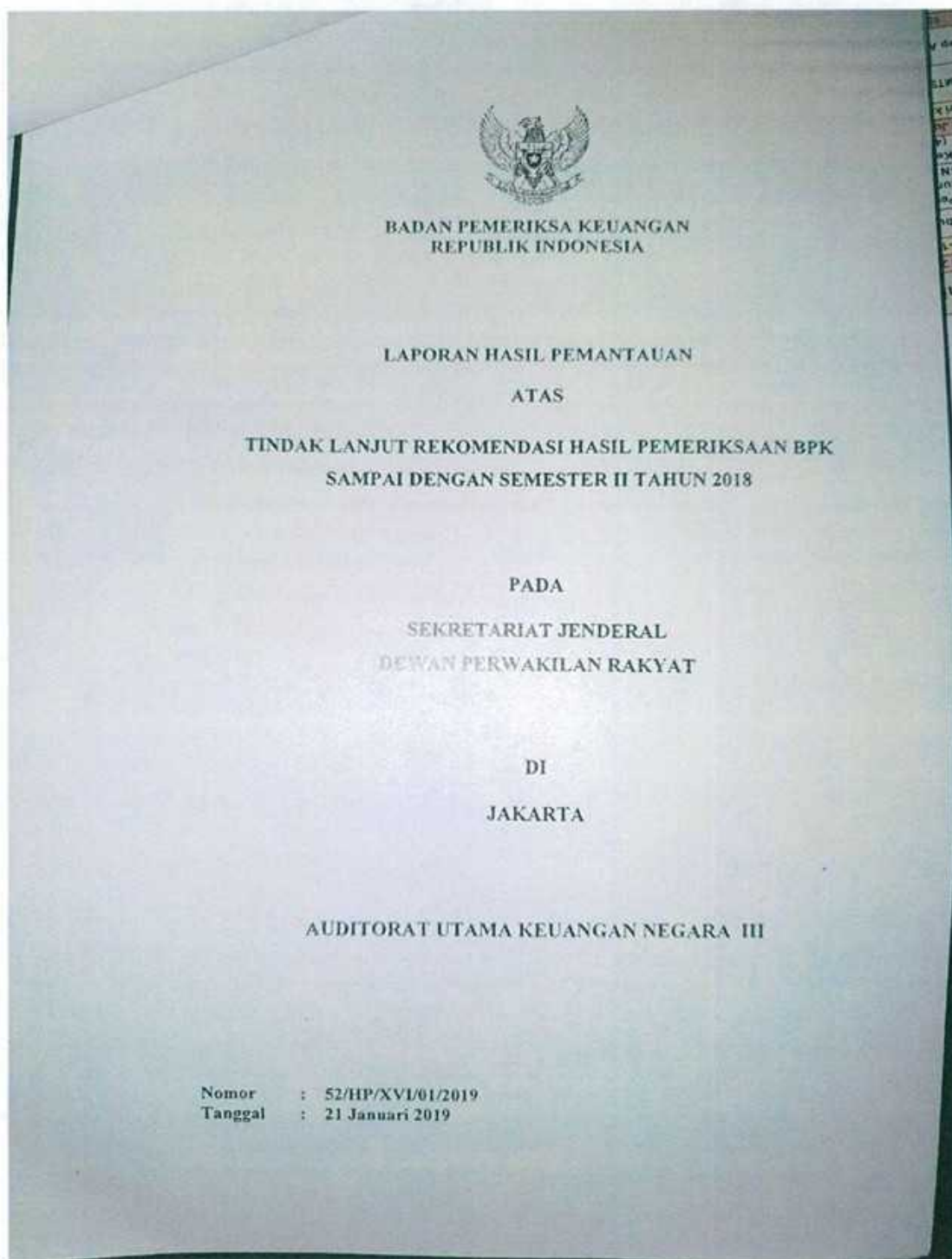
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	
				+	-
1.	Sekretaris Jenderal	1	1	0	0
2.	Deputi Bidang Administrasi	1	1	0	0
3.	Kepala Biro Protokol	27	75	0	48
4.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	33	47	4	18
5.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	117	192	4	79
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	77	107	1	31
7.	Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	150	314	11	175
8.	Kepala Biro Umum	174	1101	6	933
9.	Deputi Bidang Persidangan	1	1	0	0
10.	Kepala Biro Persidangan I	130	271	23	164
11.	Kepala Biro Persidangan II	46	66	0	20
12.	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen	41	52	1	12
13.	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	111	144	9	42
14.	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	59	330	3	274
15.	Inspektur Utama	1	1	0	0
16.	Inspektur I	12	28	0	16
17.	Inspektur II	8	14	0	6
18.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	12	31	0	19
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23	47	0	24

K. LAMPIRAN 11

Foto Kegiatan TLHP BPK:



Data TLHP BPK:



L. LAMPIRAN 12

Screenshot Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Area Pengawasan Inspektorat II:
Anggaran 2018

S-150219 Sistem Evaluasi dan Monitoring Anggaran dan Realisasi - DPR RI

• Denny Ramadon [web29@brii]

• Log Out

• Profil

Nama: Denny Ramadon

Peran: user/evaluator

Data Laporan

• Laporan

Daftar Laporan

Jenis Laporan: 1. DATA REALISASI ANGGARAN (BERJALAN)

Tanggal: 2018-01-2018 01-01-12-2018

Kode Sumber: Seluruh Data (0)

Amil Sumber: Pusat Pemeliharaan (15)

Pengirim: Denny

Tipe: Laporan

DATA REALISASI ANGGARAN (BERJALAN) TAHUN ANGGARAN

Pagu: 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2

Anggaran 2019:

B/15-2019

Perencanaan - DPR RI

JUMLAH PER BIRO - DIP TAHUN ANGGARAN 2019 UNIT DEWAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Jumlah
59	BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	105.179.724.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN	83.366.242.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	464.515.841.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	138.383.453.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	7.933.929.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2.811.234.802.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	84.562.500.000
Total		3.695.176.491.000

Hak Cipta © 2011

Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) - Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) - Sekretariat Jenderal DPR RI

**JUMLAH PER BIRO - DIPA
TAHUN ANGGARAN 2019
KEGIATAN**

Tanggal Cetak : 15-08-2019

KODE	URAIAN	JUMLAH
59	BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN	9.899.537.000
67	BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	4.664.629.000
83	BIRO UMUM	227.245.575.000
123	INSPEKTORAT I	3.511.967.000
124	INSPEKTORAT II	3.960.541.000
126	BIRO PERSIDANGAN I	7.567.782.000
127	BIRO PERSIDANGAN II	2.442.981.000
128	BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN	185.052.862.000
129	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23.529.681.000
133	PUSAT DATA DAN INFORMASI	29.612.523.000
138	PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG	17.802.702.000
139	PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG	4.852.067.000
140	PUSAT KAJIAN ANGGARAN	5.258.830.000
141	PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	3.033.333.000
143	BIRO PROTOKOL	19.798.959.000
146	BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	3.422.203.000
147	BIRO KEPENGAWAJAN DAN ORGANISASI	38.238.775.000
150	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	250.625.184.000
152	BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	1.188.237.248.000
163	PUSAT PENELITIAN	14.656.277.000

M. LAMPIRAN 13

Foto Pembuatan Cloud Inspektorat II:



N. LAMPIRAN 14

Foto Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI:



O. LAMPIRAN 15

Input Data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko:



P. LAMPIRAN 16

Foto Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI:



Q. LAMPIRAN 17

Bimbingan Kedua Bu Henny:



R. LAMPIRAN 18

Foto Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI:



S. LAMPIRAN 19

Foto Uji Coba Peta Risiko:



Form Evaluasi :

KUESIONER KEPUASAN AUDITOR INSPEKTORAT II TERHADAP APLIKASI PETA RISIKO AREA PENGAWASAN INSPEKTORAT II

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Keterangan Pengisian

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak yang berisi kolom yang tersedia

Kepuasan Auditor
SB (Skor 4) = Sangat Baik
B (Skor 3) = Baik
KB (Skor 2) = Kurang Baik
TB (Skor 1) = Tidak Baik

No	Kriteria	Skor
1	Tampilan Aplikasi Peta Risiko	
2	Kemudahan Pengoperasian	
3	Efisiensi Penginputan Data	
4	Banyaknya Periode Waktu	
5	Manfaat Ke Depan	

Berikan saran Anda untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diberikan oleh aplikasi ini?
User Response:

T. LAMPIRAN 20

Foto Menerima dan Menganalisa Hasil Evaluasi Yang Telah Diisi:



Form Evaluasi Yang Telah Diisi oleh Auditor Inspektorat II

KUESIONER KEPUASAN AUDITOR INSPEKTORAT II TERHADAP APLIKASI PETA RISIKO PENGAWASAN INSPEKTORAT II

AREA

Nama : *Denny Ransiden*
Jabatan : *Auditor Madya*
Jenis Kelamin : *Pria*
Pekerjaan : *PNS*

Keterangan Pengisian

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda silang (X) pada kotak yang berisi kolom yang tersedia

Kepuasan Auditor

SB (Skor 4) = Sangat Baik

B (Skor 3) = Baik

KB (Skor 2) = Kurang Baik

TB (Skor 1) = Tidak Baik

No	Kriteria	Skor
1	Tampilan Aplikasi Peta Risiko	<i>4</i>
2	Kemudahan Pengoperasian	<i>4</i>
3	Efisiensi Penginputan Data	<i>4</i>
4	Banyaknya Periode Waktu	<i>3</i>
5	Manfaat Ke depannya	<i>4</i>

Berikan saran Anda untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diberikan oleh aplikasi ini?

User Response:

* *Pertambah filter dalam kriteria agar tampilan data lebih variatif dan informatif*

U. LAMPIRAN 21:

Foto Kegiatan:



Undangan Rapat:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : IP/226/VIII/2019

22 Agustus 2019

Sifat : Biasa
Derajat: Segera
Perihal : Undangan

Yth.


1. Inspektur I
 2. Kepala Bagian TU Inspektorat Utama
 3. Para Kasubag TU Inspektorat Utama
 4. Auditor Inspektorat II
 5. JFU Inspektorat Utama
- Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan
yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 10.00 WIB
Acara : Sosialisasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pit. Inspektur II


Drs. Setyanta Nugraha, M.M.
NIP. 196207191988031001.

Absensi Rapat:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II
Acara : Sosialisasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. SETYANTA NUGRAHA, M.M.	INSPEKTUR UTAMA	
2.	Dy. DEWI BARLIANA S., M.Psi., QIA.	INSPEKTUR I	
3.	HANAFIAH, S.Sos.	KABAG TU ITTAMA	
4.	ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
5.	AFNIWATY TANJUNG, S.E., M.E.	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN	
6.	TIMBANG SUPRIYANTO, S.Sos.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
7.	ENDEN ADIPATI KOMA, S.E., M.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
8.	DENI WIBISONO, S. Hut., M. Si., Ctr.A.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
9.	NURHARIYANI S.E., M.M.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
10.	DENNY RAMADON, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
11.	HASNELSON, SH.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
12.	TARYONO, S.A.P.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
13.	MARGARETHA SUSANTI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
14.	FAISAL RIYADI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
15.	FITRIYANI LESTARI, S.E.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
16.	MUFTI FIKRI NUR FAUZI, A. Md.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
17.	PUTRI WIDYASARI NOVIYANTO, A. Md.	AUDITOR INSPEKTORAT II	
18.	RETI ARDIYANTI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
19.	SRI NASTITI TRI NURASHI, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
20.	HARYANTI	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	

21.	ANA MUTA'AFFIF	PENGADMINISTRASI UMUM	
22.	INDAH TUSILA WATI	PENGADMINISTRASI UMUM	
23.	MUHAMAD ALI, S.Sos.	PENGELOLA DATA	
24.	SURETIANTO, S.Kom.	PENGELOLA DATA	
25.	ANTONIUS DERYAL G., S.E	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
26.	ALISA FATIMAH, S.E	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
27.	DYATRI MICKY ANGRITA, S.I.P	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
28.	MUHAMMAD ILHAM ANTARIKSA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
29.	ZELKA SEVRINA, S.E.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
30.	ZAHRA WANISA, S. IAN.	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	
31.	ARIZAL MASHUDI, A.Md	PENGELOLA DATA	
32.	MIKHAIL MUHAMAD JIBRIL, A.Md., Ak.	PENGELOLA DATA	
33.	REZA PRISCHA NANDA, A.Md	PENGELOLA DATA	
34.	FIROSA SIREZIA, S.E	PENGELOLA DATA	
35.	ISFANDI MULYANA	PENGELOLA DATA	
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			

Laporan Singkat:



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

SOSIALISASI PENYUSUNAN APLIKASI PETA RISIKO INSPEKTORAT II SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Tempat : Ruang Rapat Inspektorat II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 5
Acara : Sosialisasi Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Inspektorat II
Ketua Rapat : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P (Auditor Ahli Madya Inspektorat II)
Penyaji : Faisal Riyadi (Auditor Ahli Pertama Inspektorat II)
Hadir : 1. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat II
2. Rekan-Rekan Tata Usaha Inspektorat II
3. Rekan-Rekan CPNS

PENDAHULUAN

1. Rapat dimulai Pada Hari Senin, 26 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB dibuka oleh Bapak Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P
2. Kemudian dilanjutkan dengan:
 - a. Ketua Rapat menyampaikan beberapa kata pengantar sebagai berikut:
 - 1) Sebagai tahapan menuju pengangkatan CPNS, Sdr. Faisal Riyadi harus melalui pelatihan dasar, yang dalam pelaksanaan akhir diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi.
 - 2) Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tahap terakhir dari rencana kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi.
 - 3) Kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi sudah diimplementasikan pada masa habituasi selama 30 hari Bulan Juli-Agustus 2019.

-
- 4) Sosialisasi dilaksanakan agar para auditor mengetahui output akhir dari kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi, yaitu aplikasi peta risiko pada area pengawasan Inspektorat II serta memahami pengoperasian dari aplikasi tersebut.
 - 5) Tahapan selanjutnya, Sdr. Faisal Riyadi akan menjalani siding akhir pelatihan dasar CPNS 2019 yang rencananya akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada tanggal 2-4 September 2019.
 - 6) Koordinator rapat kemudian mempersilahkan Sdr. Faisal Riyadi untuk menyampaikan hasil aktualisasi yang sudah dilaksanakan pada masa habituasi selama 30 hari di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- b. Faisal Riyadi Auditor Ahli Pertama Inspektorat II menyampaikan :
- 1) Kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada masa habituasi selama jangka waktu 30 hari.
 - 2) Pada saat pelaksanaan, ada beberapa tahapan yang mengalami perubahan target waktu di timeline, menyesuaikan dengan dinamika dan loot pekerjaan yang ada di Lingkungan Inspektorat II maupun Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
 - 3) Penyusunan Aplikasi Peta Risiko telah selesai dilaksanakan, melalui proses koordinasi dengan para stakeholder, yaitu Bidang Data dan Informasi (BDTI), Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kepegawaian serta Lingkungan Inspektorat Utama itu sendiri.

4) Berikut adalah capaian kegiatan aktualisasi yang sudah disusun dalam bentuk Tabel:

Milestone	No	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
Rapat dengan Internal Inspektorat II	1	Presentasi singkat rancangan kegiatan di hadapan Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 1 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	2	Pembuatan Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan dan sudah ditandatangani oleh Bpk. Inspektur Utama	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 2 <ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Aktualisasi
	3	Bimbingan Pertama dengan coach Ibu Heny Widyaningsih	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 3 <ul style="list-style-type: none"> Kartu Kendali Foto Kegiatan
	4	Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Risiko Inspektorat II	Kamis, 25 Juli 2019	Lampiran 4 <ul style="list-style-type: none"> Undangan Rapat Absensi Rapat Laporan Singkat Rapat Bahan Rapat Foto Kegiatan
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)	5	Rapat Koordinasi dengan BDTI terkait Rancangan Aktualisasi CPNS Angkatan 2	Selasa, 23 Juli 2019	Lampiran 5 <ul style="list-style-type: none"> Laporan Singkat Foto Kegiatan
	6	Mengirim rancangan aplikasi peta risiko ke BDTI cc. Sasmito	Selasa, 30 Juli 2019	Lampiran 6 <ul style="list-style-type: none"> Screenshot Email
Pengumpulan data penunjang terkait penyusunan aplikasi peta risiko	7	Membuat dan mengirimkan surat permintaan data Anggaran yang dikelola oleh 10 biro di bawah pengawasan Inspektorat II ke Biro Perencanaan dan Keuangan	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 7 <ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Data
	8	Membuat dan mengirimkan surat	Senin, 29 Juli 2019	Lampiran 8

		permintaan data Analisis Beban Kinerja (ABK) ke Biro Kepegawaian		<ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Data
	9	Membuat dan mengirimkan surat permintaan pembuatan akun cloud ke Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk Inspektorat II	Rabu, 31 Juli 2019	Lampiran 9 <ul style="list-style-type: none"> Surat Permintaan Pembuatan Cloud Inspektorat II
	10	Penerimaan data ABK 2017-2019	Jumat, 2 Agustus 2019	Lampiran 10 <ul style="list-style-type: none"> Screenshot Email Data ABK 2017-2018
	11	Koordinasi dengan TU ITTAMA terkait Aplikasi Peta Risiko dan Permintaan data TLHP BPK	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 11 <ul style="list-style-type: none"> Data TLHP BPK Foto Kegiatan
	12	Penerimaan Data Pagu Anggaran dari Aplikasi Sincan Perencanaan cc. Mas Deni	Kamis, 15 Agustus 2019	Lampiran 12 <ul style="list-style-type: none"> Data Pagu Anggaran 10 Biro/Unit/Pusat di Bawah Pengawasan Inspektorat II Screenshot Data
Membuat peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	13	Pelaksanaan Pembuatan Cloud Irda	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 13 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	14	Rapat Pemaparan Hasil Pekerjaan Aktualisasi oleh BDTI	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 14 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	15	Input data sesuai jenis periode, pengolahan data di dalam aplikasi peta risiko	Rabu, 7 Agustus 2019	Lampiran 15 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	16	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap I dengan BDTI	Kamis, 8 Agustus 2019	Lampiran 16 <ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan
	17	Bimbingan Kedua Bu Henny	Jumat, 9 Agustus 2019	Lampiran 17 <ul style="list-style-type: none"> Kartu Kendali

				<ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	18	Finalisasi Aplikasi Peta Risiko Tahap II dengan BDTI	Selasa, 13 Agustus 2019	Lampiran 18 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
Melakukan uji coba dan evaluasi peta risiko beserta aplikasi pendukungnya	19	Uji coba peta risiko	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 19 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan •
	20	Pembuatan dan penyebaran form evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 20 <ul style="list-style-type: none"> • Form Evaluasi Kepuasan Aplikasi Peta Risiko • Foto Kegiatan
	21	Menerima hasil evaluasi yang telah diisi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 21 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
	22	Menganalisa hasil evaluasi	Kamis, 22 Agustus 2019	Lampiran 22 <ul style="list-style-type: none"> • Foto Kegiatan
Melaporkan hasil akhir kegiatan	23	Sosialisasi materi aplikasi peta risiko di Lingkungan Inspektorat II	Senin, 26 Agustus 2019	Lampiran 23 <ul style="list-style-type: none"> • Undangan Rapat • Absensi Rapat • Laporan Singkat • Foto Kegiatan

- 5) Dari 23 capaian kegiatan aktualisasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Nasionalisme).
- 6) Aplikasi Peta Risiko dapat diakses dengan cara membuka portal.dpr.go.id, lalu buka aplikasi Siratu, selanjutnya klik Aplikasi Peta Risiko yang berada di sub kiri aplikasi Siratu.
- 7) Aplikasi Peta Risiko ini terdiri dari 3 faktor risiko, yang terdiri dari Anggaran yang dikelola, selisih gap antara jumlah kebutuhan pegawai dengan pemangku kepentingan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK (TLHP) pada 10 biro yang berada di bawah area pengawasan Inspektorat II.

8) BDTI menjelaskan bahwa sebaiknya aplikasi peta risiko memang diintegrasikan ke dalam aplikasi yang sudah ada di unitnya masing-masing, dalam hal ini adalah aplikasi Siratu yang merupakan produk dari Inspektorat Utama, itulah alasan utama kenapa aplikasi peta risiko terintegrasi dengan aplikasi Siratu.

9) Pada pelaksanaan uji coba aplikasi peta risiko, para pimpinan dan auditor di unit Inspektorat II sangat mengapresiasi terhadap aplikasi tersebut.

3. Kesimpulan Hasil Sosialisasi Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II, yaitu:

- a) Jajaran Inspektorat II sudah mengetahui mengenai output akhir dari kegiatan aktualisasi sdr. Faisal Riyadi, yaitu Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II.
- b) Aplikasi ini akan sangat berguna sebagai landasan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pelaksanaan audit yang berbasis risiko.
- c) Langkah menuju Internal Audit Capability Model (IACM) level 3 pun semakin terbuka, karena salah satu syaratnya adalah adanya pengelolaan dan pelaksanaan audit yang berbasis risiko.
- d) Mempermudah dalam pelaksanaan identifikasi risiko dari setiap unit
- e) Pengembangan terhadap aplikasi ini masih sangat terbuka lebar terutama dalam penambahan faktor risiko yang akan sangat mungkin bertambah kedepannya.

-
- f) Dukungan dari para auditor di unit Inspektorat II akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan tepat guna dari aplikasi peta risiko yang sudah disusun oleh sdr. Faisal Riyadi.
- g) Aplikasi Peta Risiko tersebut akan sangat menunjang kinerja auditor Inspektorat II pada khususnya dan Inspektorat Utama pada umumnya.
3. Rapat ditutup pada Pada Pukul 12:15 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2019
Ketua Rapat



Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
NIP.196907151999031004

DOKUMENTASI KEGIATAN:



[illegible]

S.I.R.A.T.U									
Daftar Kriteria Risiko									
Risiko: 1 - 10 / 10 / 100									
No.	Uraian	Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor
1.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
2.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
3.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
4.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
5.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
6.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
7.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
8.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
9.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
10.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10

S.I.R.A.T.U									
Daftar Peta Risiko									
Risiko: 1 - 10 / 10 / 100									
No.	Uraian	Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor
1.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
2.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
3.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
4.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
5.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
6.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
7.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
8.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
9.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10
10.	Indikator yang terdapat	Indikator 1	10	Indikator 2	10	Indikator 3	10	Indikator 4	10

